



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Juni 2021

Halaman: 1

Dijerat Sanksi Tipiring

Warga Keluhkan Tarif Parkir 'Nuthuk'

YOGYA, TRIBUN - Viral tarif parkir 'nuthuk' di kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan menyeret empat oknum juru parkir untuk menghadapi proses hukum.

Seperti diwartakan, seorang warga mengeluhkan tarif parkir untuk mobil sebesar Rp20.000 melalui facebook. Warga tersebut juga menyertakan bukti karcis parkir.

KBO Sabhara Polresta Yogyakarta, Iptu Eko Yudi mengatakan, pihaknya sudah memanggil keempat oknum tersebut, untuk dimintai keterangan, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Rabu (2/6/21).

Ia memastikan, mereka dijerat dengan sanksi Tindak Pidana Ringan.

"Ada empat orang, tapi yang hadir baru dua, sudah dilakukan penindakan, untuk sidangnya dijadwalkan tanggal 9 (Juni). Kemudian, untuk dua orang yang belum hadir, akan ada pemanggilan kedua nanti," ungkap Eko Yudi.

"Surat pemanggilannya sudah dititipkan kedua rekannya itu tadi, ya. Jadi, tanggal 4 (Juni) ada pemanggilan kedua, karena belum hadir. Semua dijerat Tipi-

ring," lanjut ia.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arief Nugroho mengatakan, keempat oknum tersebut tidak mempunyai legalitas, untuk melakukan aktivitas parkir di kawasan itu. Terlebih, sesuai aturan, sekiraan Titik Nol Kilometer pun dilarang keras untuk parkir.

"Ini aktivitas ilegal, tempat itu tidak dimungkinkan ada izin parkir. Hanya sekitar 50 meter dari Nol Kilometer. Dari sisi aturan tidak mungkin. Jelas ilegal," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya pun memasrahkan proses hukum kepada pihak kepolisian, karena yang bisa dilakukan Dishub hanya sebatas pembinaan saja.

Ia pun tak menampik lokasi tersebut memang rawan parkir liar. Namun, selama ini, oknumnya cukup ihai menghindari petugas.

"Mereka itu kucing-kucingan. Kalau ilegal tidak mungkin terbuka. Saat ada petugas, mereka tidak tampak. Tapi, kemarin ada aduan, dan ketemu," cetusnya.

● ke halaman 11

Dijerat Sanksi

● Sambungan Hal 1

"Kami selalu antisipasi. Tapi, kami dengan kepolisian tidak mungkin meng-cover semuanya. Silakan dilihat ya, terutama Jumat, Sabtu, Minggu, kita patroli, jalan di titik rawan, tapi selalu kucing-kucingan," imbuh Agus.

Terpisah, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Ponorwadi menegaskan bahwa oknum 'nuthuk' tarif parkir itu telah melakukan aksi pungutan liar (pungli), karena tidak memiliki legalitas apapun.

Oleh sebab itu, lanjutnya, kasus ini dilimpahkan ke Polresta Yogyakarta. Sebab, setelah dilakukan penelusuran, orang yang menarik tarif di atas Peraturan Daerah (Perda) itu, melakukan aktivitas parkir di titik yang dilarang.

"Masuk kategori pungli. Penanganan lebih lanjutnya kita arahkan ke Polres, dengan Tim Saber Pungli. Artinya, orang-orang itu me-

lakukan pungutan liar, dan bertindak seperti petugas parkir berizin," cetusnya, Rabu (2/6).

"Mereka ini, jika ada tugas, tidak ada di tempat. Tapi, saat patrolinya berlalu, mereka muncul dan mengatur parkir di tempat yang tidak diperbolehkan," lanjut Heroe.

Ia pun berharap, supaya pengunjung bisa lebih jeli dalam memilih tempat parkir. Apalagi, di seputaran Malioboro kini sudah terdedia kantong-kantong yang legal. Sehingga, dari sisi tarif, jelas bisa lebih diper-tanggungjawabkan.

Misal di Abu Bakar Ali, seputaran Sriwedari, selatan Pasar Beringharjo, sekiraan Jalan Pajeksan, dan beberapa tempat lainnya, masih banyak sekali itu," tandas Wawali.

Pemkot juga meminta agar wisatawan tidak segan untuk bertanya kepada petugas parkir, mengenai kejelasan tarif. Seandainya mendapat perlakuan yang tidak semestinya, dimbau secepatnya melapor ke pe-

tugas terdekat.

"Sebab, untuk destinasi wisata, termasuk Malioboro, selalu ada petugas, baik Jogoboro, Satpol PP, hingga dari Dishub. Mereka siap membantu wisatawan," ujarnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait kasus tarif parkir mahal tersebut. Sultan mengakui, masalah perparkiran di ikon Kota Yogyakarta tersebut memang sulit teratasi.

Terlebih kawasan Malioboro kerap dipadati kendaraan wisatawan sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas maupun kendaraan yang hendak parkir.

"Bisa nggak sih kita ini berpikir berbeda, (Pemerintah) Kota itu. Karena tidak mudah mencari tempat parkir Malioboro dan Malioboro itu punya masalah trafik parkir maupun beban kendaraan," jelas Sultan, kemarin.

Raja Keraton Yogyakarta ini pun mengusulkan

untuk menjadikan lahan parkir di sekitar Malioboro sebagai tempat parkir premium.

Yakni degan memberlakukan tarif parkir berdasarkan jarak menuju Malioboro. Semakin dekat lahan parkir dengan Malioboro, tarif parkirnya akan semakin mahal.

Sebaliknya, jika tempat parkir itu tergolong jauh, harganya akan semakin murah.

"Ya sudah yang dekat Malioboro nyatakan saja premium. Parkir di Malioboro (dibuat) larang (mahal). Kan gitu. Makin jauh parkirnya dari Malioboro murah. Gitu kan saja," jelas Sri Sultan.

Namun, untuk mewujudkan ide tersebut harus disertai adanya keputusan dan dasar peraturan yang jelas. Termasuk aturan penentuan tarif parkir berdasarkan jarak menuju Malioboro.

"Tapi keputusan itu harus ada jelas. Untuk tidak disalahgunakan," tegas Sri Sultan. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005